LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN SEPTEMBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 7 Oktober 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Perempuan dan Anak
3. Para Kasi
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran pembantu
6. Pejabat Verifikasi/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Notulis

Pelaksana Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 70,25 %

b.Keuangan = 13.403.151.763 (65,06%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Administrasi Umum							
	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.710.000			6.950.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.710.000	66,22	48,30	6.950.000	(17,92)	Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut penyelenggaraan rapat-rapat secara virtual (adanya PPKM), sehingga realisasi tidak dapat memenuhi target.
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.500.000			2.120.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	66,43	27,72	2.120.000	(38,71)	Meningkatnya kasus Covid 19 sehingga dikeluarkannya SE Gub tentang pembatasan PPKM maka

							Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak diperbolehkan (dibatasi) sehingga capaiannya dibawah target yang ditentukan, selain itu rapat2 koordinasi dilakukan secara virtual.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	15.750.000			10.500.000		
1	Pertemuan Rutin Pengurus dan Pelaksanaan Program Kerja FAN Jateng	15.750.000	83,33	66,67	10.500.000	(16,67)	Yang bulan Agustus belum dilaksanakan karena masih PPKM
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	35.160.000			29.074.000		
1	Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak	35.160.000	100	86,12	29.074.000	(13,88)	karena PPKM
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana – Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	45.262.000			1.000.000		
1	Penyusunan GDPK	45.262.000	80,89	73,53	1.000.000	(7,36)	karena masih proses penyusunan dari pihak ketiga
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi							

	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	3.850.000			0		
1	Monev Parameter Pengendalian Kependudukan	3.850.000	10	0	0	(10)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	40.808.000			10.530.500		
1	Orientasi Kader Kelompok BKR	32.023.000	100	99	5.671.500	(1)	karena adanya PPKM, sehingga ada beberapa kegiatan yang sedianya sudah dilaksanakan, harus ditunda.
2	Orientasi Kader Kelompok BKL	8.785.000	100	99	4.859.000	(1)	karena adanya PPKM, sehingga ada beberapa kegiatan yang sedianya sudah dilaksanakan, harus ditunda.
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	22.317.000			8.127.000		
1	Kegiatan Supervisi dan Jaringan Kemitraan Kelompok UPPKS	22.317.000	63,78	61,50	8.127.000	(2,28)	menunggu perubahan anggaran.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana – Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.481.379.000			941.954.000		
1	Pelayanan KB MKJP	1.481.379.000	68,80	43,73	941.954.000	(25,07)	Kegiatan pelayanan KB MKJP masih dilakukan dengan jumlah akseptor

							yang dibatasi, karena tenaga esehatan harus menangani kegiatan vaksin yang ada di faskes.
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	176.321.000			95.198.500		
1	Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB TMKK	47.000.000	48,98	39,66	16.079.500	(9,32)	adanya aturan tentang ppkm yang membatasi kegiatan kemasyarakatan, sehingga lomba – lomba tidak dapat dilaksanakan dan anggaran dialihkan menjadi kegiatan monitoring TMKK
2	Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja	46.291.000	100	96,38	34.185.000	(3,62)	tidak bisa dilaksanakan karena adanya aturan ppkm
3	Pengembangan Model KIE tentang KB-KS	83.030.000	100	93,00	44.934.000	(7,00)	tidak dapat dilaksanakan karena adanya aturan ppkm

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	13	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan September terdapat 16 kegiatan yang mengalami deviasi antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Belanja Makanan dan Minuman Tamu dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut penyelenggaraan rapat-rapat secara virtual (adanya PPKM), sehingga realisasi tidak dapat memenuhi target.
2. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan Meningkatnya kasus Covid 19 sehingga dikeluarkannya SE Gub tentang pembatasan PPKM maka Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tidak diperbolehkan sehingga capaiannya dibawah target yang ditentukan.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Belanja Pakan Ikan dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, dikarenakan ikan arwana (dalam aquarium) mati, maka pagu anggaran sisa akan diajukan pada perubahan APBD.
4. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Peningkatan Wawasan Terkait PUG dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara luring.
5. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Peningkatan partisipasi dan kapasitas perempuan potensial dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan adanya kebijakan PPKM di daerah.
6. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelatihan PPEP dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga beberapa daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb.

7. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Layanan PUSPAGA dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara luring.
8. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga koordinasi Gugus Tugas tidak dilaksanakan secara luring.
9. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu pertemuan rutin pengurus dan pelaksanaan program kerja FAN jateng dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara luring.
10. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara luring.
11. Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penyusunan GDPK dikarenakan masih menunggu kesiapan dari pihak ketiga atau proses penyusunan dari pihak ketiga.
12. Kegiatan Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Analisa Dampak Pembangunan Kependudukan dikarenakan menunggu kesiapan dari analis.
13. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja terdapat 4 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Orientasi kader kelompok BKR, Orientasi kader kelompok BKL, Harganas Tingkat Pusat dan Belanja Jasa Tenaga Teknis dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb dan Rekrutmen tenaga teknis tidak dilaksanakan, pagu anggaran akan di rasionalisasi pada saat perubahan APBD.
14. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Orientasi Kader Kelompok UPPKS dan Kegiatan Supervisi dan Jaringan Kemitraan Kelompok UPPKS dikarenakan kegiatan tersebut mengalami perubahan sehingga teknis kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah perubahan anggaran tersebut disetujui.
15. Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelayanan KB MKJP dikarenakan masih dilakukan dengan jumlah akseptor yang dibatasi, karena tenaga kesehatan harus menangani kegiatan vaksin yang ada di Faskes.
16. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja terdapat 3 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penggerakan dan bakti sosial pelayanan KB TMKK, Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja, dan Pengembangan model KIE tentang KB-KS dikarenakan adanya aturan tentang ppkm yang membatasi kegiatan kemasyarakatan, sehingga lomba - lomba tidak dapat dilaksanakan dan anggaran dialihkan menjadi kegiatan monitoring TMKK, selain itu terkena dampak refocusing sehingga anggaran yang tersisa yaitu Uang Harian, akan dilakukan perubahan pada saat perubahan APBD dan Pengembangan Model KIE tentang KB-KS dikarenakan kegiatan monitoring model kie tentang KB KS belum dapat dilaksanakan secara luring karena adanya PPKM darurat.

Upaya

Upaya mengatasi permasalahan 16 kegiatan yang mengalami deviasi negatif yaitu pada bulan Oktober untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan 16 kegiatan tersebut atau melalui daring namun untuk 3 SSK antara lain Belanja Jasa Tenaga Teknis, Belanja Pakan Ikan, dan Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja kegiatan menunggu perubahan APBD.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan Oktober sebagai berikut:

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Surat menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15. Pendidikan dan Pelatihan formal

Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan (PUG) pada lembaga Pemerintah kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.
4. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Provinsi.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.
2. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi.
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan Tk. Daerah Prov. Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB.
6. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tk. Daerah Prov dalam Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabid/Kasi/Kasubbag agar selalu mengontrol dan mencermati realisasi fisik dan keuangan serta reasoningnya pada aplikasi e-controlling setiap akhir bulan. (Realisasi fisik bukan berarti realisasi keuangan)
2. APBD Perubahan direncanakan di sahkan sekitar minggu ketiga bulan Oktober, diharapkan Kabid/ Kasi/Kasubag mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pasca perubahan.
3. Dimohon bidang yang memiliki kegiatan di desa dampingan untuk segera melakukan kegiatan di desa tersebut dalam rangka optimalisasi akselerasi pelaksanaan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
4. Dimohon Kabid/Kasi/Kasubbag segera mengumpulkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2021.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan September 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Kamis 7 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM
NIP. 196811241993102001